

**PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM MENDORONG
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN (SDGs) DI KEMANTREN
KOTAGEDE YOGYAKARTA**



Skripsi

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**

Disusun oleh:

Muhammad Misbahul Munir Bin Tamsir

NIM 22102030035

Dosen Pembimbing

Dr. Muhamad Rudi Wijaya, M.Pd.I

NIP 19890610 202403 1 001

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2026**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1175/Un.02/DD/PP.00.9/07/2026

Tugas Akhir dengan judul : PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENDORONG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (SDGs) DI KEMANTREN KOTAGEDE YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD MISBAHUL MUNIR BIN TAMSIR
Nomor Induk Mahasiswa : 22102030035
Telah diujikan pada : Selasa, 23 Juni 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Muhamad Rudi Wijaya, M.Pd.I
SIGNED

Valid ID: 6a533a08b587



Penguji I

Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6a50a095d373



Penguji II

Muhamad Rashid Hilmi, S.Si., M.Sc.
SIGNED

Valid ID: 6a503e0d0e



Yogyakarta, 23 Juni 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Prof. Dr. Arif Maftuhin, M.Ag., M.A.I.S.
SIGNED

Valid ID: 6a5461087490f

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Misabahul Munir Bin Tamsir
NIM : 22102030035
Judul Skripsi : PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA
HARAPAN (PKH) DALAM MENDORONG
PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN YANG
BERKELANJUTAN (SDGs) DI KEMANTREN
KOTAGEDE YOGYAKARTA

skripsi tersebut sudah memenuhi syarat

- o Bebas dari unsur plagiarisme.
- o Hasil pemeriksaan similaritas melalui Turnitin menunjukkan tingkat kemiripan sebesar 15% dengan menggunakan setelan "small match exclusion" sepuluh kata.
- o Sistematika penulisan telah sesuai dengan Pedoman Penulisan Skripsi yang berlaku.

dan sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana.

Dengan ini kami berharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

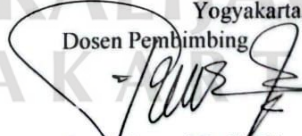
Yogyakarta, 15 Juni 2026

Ketua Program Studi



Siti Aminah, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 19830811 201101 2 010

Dosen Pembimbing



Dr. Muhamad Rudi Wijaya, M.Pd.I
NIP. 19890610 202403 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Misbahul Munir Bin Tamsir
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENDORONG PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN (SDGs) DI KEMANTREN KOTAGEDE YOGYAKARTA adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juni 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Misbahul Munir Bin Tamsir
NIM. 22102030035

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dengan kenikmatan dari-Nya menjadi sempurna, sehingga atas kuasa-Nya penulis mampu menuntaskan tugas akhir.

Teruntuk Ibu dan Bapak, terima kasih atas segala dukungan, cinta dan doa yang tulus. Terima kasih atas kepercayaan dan setiap pelajaran hidup yang kalian berikan.

Teruntuk seluruh insan yang hadir dalam hidup penulis, terima kasih telah membersamai penulis dalam setiap proses bertumbuh.

Sebagai penutup, karya ini penulis persembahkan kepada almamater tercinta, Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis mengucapkan terima kasih atas ilmu pengetahuan, nilai-nilai kehidupan, serta berbagai kesempatan yang telah diberikan selama masa perkuliahan sehingga turut membentuk pribadi yang lebih dewasa dan berkembang. Semoga skripsi ini dapat menjadi kontribusi kecil yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di lingkungan kampus, khususnya dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

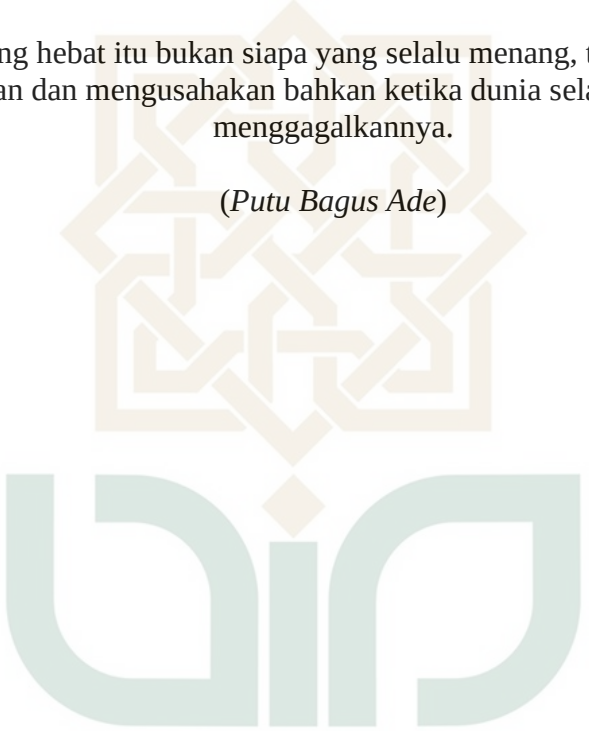
MOTTO

Hidup adalah pengabdian, dan tidak ada pengabdian tanpa pengorbanan.
Nikmatilah semua susahmu sebelum tercapai suksesmu. Alam semesta tak pernah
terburu-buru tapi semuanya tercapai.

(Penulis)

Barangkali yang hebat itu bukan siapa yang selalu menang, tapi siapa yang tetap
berjalan dan mengusahakan bahkan ketika dunia selalu berusaha
menggagalkannya.

(Putu Bagus Ade)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji syukur bagi Allah SWT atas segala rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, saran serta masukan sangat penulis harapkan sebagai bahan evaluasi skripsi ini agar lebih baik.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bimbingan, bantuan, dukungan dan doa dari berbagai pihak. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhadi., M.A., M. Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Arif Maftuhin M.Ag., M.A.I.S selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Siti Aminah, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Beti Nur Hayati, M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
Terima kasih atas dampingannya selama masa perkuliahan di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Dr. Muhamad Rudi Wijaya, M.Pd.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi (DPS).
Terima kasih atas bimbingan, saran, masukan serta motivasi selama proses penelitian hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen dan karyawan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan saat menuntut ilmu kepada kami.
7. Kepada Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Kemantren Kotagede, Ibu Erlin Dwi Kusumawati, Bapak Andiko Suryo Aji Gumelar dan Ibu Indah Maya Sari, serta beberapa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah meluangkan waktu dan membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.
8. Kepada orang tua saya, Ibu Jumiati dan Bapak Tamsir yang darahnya mengalir dalam tubuh saya dan selalu sabar membersarkan putranya, yang selalu melangitkan doa-doa baik. Beliau memang tidak sempat menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi, dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsinya. Satu hal yang perlu Ibu dan Bapak ketahui, saya sangat menyayangi dan mencintai kalian. Tolong hidup lebih lama di dunia ini, dan izinkan saya untuk mengabdikan dan membalas segala pengorbanan yang kalian lakukan selama ini. Terima kasih karena sudah mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dari kecil hingga saat ini, doa dan keikhlasan dari kalian yang telah mengantarkan penulis untuk mewujudkan impian.

9. Kepada seseorang yang tak kalah penting, yaitu D. Amzarina terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat, dukungan serta bantuan baik itu tenaga, waktu maupun moril kepada penulis. Terima kasih telah menjadi rumah dan pendamping dalam segala hal, mendengar keluh kesah, memberi semangat untuk tidak pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua.
10. Kepada diri saya sendiri, Muhammad Misbahul Munir Bin Tamsir, yang telah berusaha melewati setiap tantangan dalam proses penyusunan skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan tekanan, saya memilih untuk tidak berhenti, karena saya percaya bahwa proses ini adalah bagian penting dari pembentukan karakter dan kedewasaan diri. Sebagaimana pesan bijak dari B.J. Habibie *"Hiduplah seperti kamu akan mati besok. Belajarliah seperti kamu akan hidup selamanya"* Kutipan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan dalam menuntut ilmu tidak hanya tentang mencapai hasil, tetapi tentang mencintai proses dan menghargai setiap pelajaran yang datang seiring waktu.

Yogyakarta, 15 Juni 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Misbahul Munir Bin Tamsir
NIM. 22102030035

ABSTRAK

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal masih dihadapkan pada kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta ketimpangan layanan sosial bagi keluarga rentan. Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga membutuhkan pendamping yang membantu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengakses layanan dan membangun kemandirian. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran serta hasil pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede Yogyakarta.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif di Kemantren Kotagede yang meliputi Kelurahan Purbayan, Rejowinangun, dan Prenggan. Informan dipilih secara *purposive sampling* dan terdiri atas tiga pendamping PKH serta sembilan KPM dengan kondisi kepesertaan yang beragam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, kemudian diuji dengan triangulasi sumber dan metode serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH menjalankan peran fasilitatif, edukatif, representatif, dan teknis. Peran tersebut terlihat dalam fasilitasi akses pendidikan, layanan kesehatan dan jaminan sosial, penyelesaian persoalan administrasi, P2K2, penguatan pengelolaan keuangan, serta penghubungan KPM dengan program pemberdayaan dan layanan lintas instansi. Hasil pendampingan tampak pada meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, perhatian keluarga terhadap gizi dan pengasuhan, kemampuan mengatur kebutuhan keluarga, pemanfaatan bantuan secara lebih terarah, serta dorongan menuju usaha produktif dan graduasi mandiri. Kontribusi ini mendukung pengentasan kemiskinan, kehidupan sehat, pendidikan berkualitas, dan berkurangnya kesenjangan namun perubahan perilaku dan kemandirian KPM belum merata sehingga pendampingan berkelanjutan tetap diperlukan.

Kata Kunci: Pendamping PKH; Keluarga Penerima Manfaat; Pemberdayaan; SDGs; Kesejahteraan Sosial

ABSTRACT

The achievement of Sustainable Development Goals (SDGs) at the local level still faces challenges of poverty, limited access to education and health services, and disparities in social services for vulnerable families. The Family Hope Program (Program Keluarga Harapan/PKH) not only distributes financial assistance but also requires facilitators who assist Beneficiary Families (Keluarga Penerima Manfaat/KPM) in accessing services and building self-reliance. This study aims to analyze the roles and outcomes of PKH facilitators in advancing SDG achievement in Kemantren Kotagede, Yogyakarta.

This research employed a descriptive qualitative method conducted in Kemantren Kotagede, covering the sub-districts (kelurahan) of Purbayan, Rejowinangun, and Prenggan. Informants were selected through purposive sampling, consisting of three PKH facilitators and nine KPM with varying participation conditions. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation, then validated using source and method triangulation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that PKH facilitators carry out facilitative, educative, representative, and technical roles. These roles are reflected in facilitating access to education, health services, and social security; resolving administrative issues; conducting P2K2 (Family Development Sessions); strengthening family financial management; and connecting KPM with empowerment programs and cross-agency services. The outcomes of this facilitation are evident in improved access to education and health services, increased family attention to nutrition and child-rearing, enhanced ability to manage household needs, more focused utilization of assistance, and encouragement toward productive enterprises and independent graduation (graduasi mandiri) from the program. These contributions support poverty alleviation, healthy living, quality education, and reduced inequality; however, behavioral change and self-reliance among KPM remain uneven, indicating that continued facilitation is still necessary.

Keywords: PKH Facilitators; Beneficiary Families; Empowerment; SDGs; Social Welfare

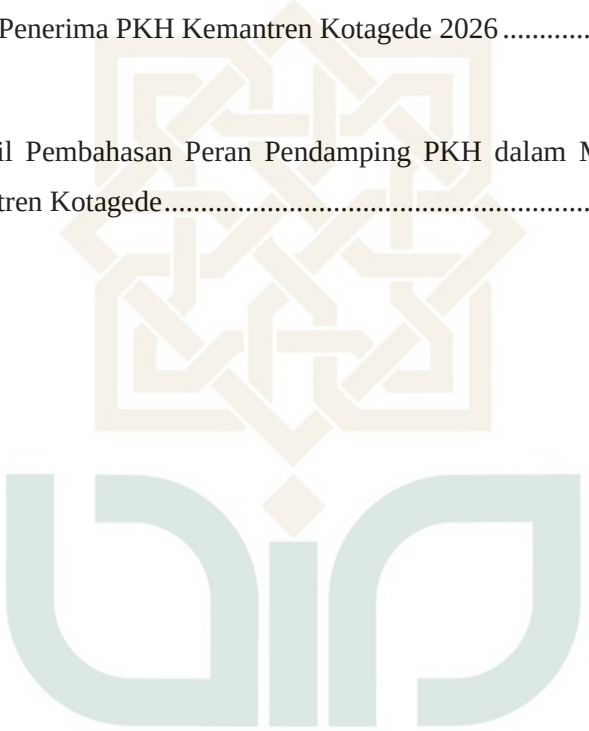
DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kajian Teori.....	14
1. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	14
2. Teori Peran (<i>Role Theory</i>)	16
G. Metodologi Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian	29
2. Fokus Penelitian	30
3. Teknik Pengumpulan Data	32
4. Teknik Validasi Data	34
5. Teknik Analisis Data	34
H. Sistematika Pembahasan	36
BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
A. Profil Kemantren Kotagede Yogyakarta	38
1. Visi dan Misi Kemantren Kotagede	39
2. Kondisi Demografis dan Sosial Ekonomi Masyarakat.....	40
3. Kondisi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial...	41

C. Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemantren Kotagede	43
1. Gambaran Umum, Tujuan dan Sasaran PKH	43
D. Pelaksanaan PKH di Kemantren Kotagede	45
1. Kegiatan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2/FDS)	46
2. Pendampingan Pendidikan Anak	47
3. Pendampingan Kesehatan Ibu dan Anak	49
4. Verifikasi Komitmen dan Pemutakhiran Data KPM	50
5. Kunjungan Rumah (<i>Home Visit</i>)	51
6. Pemberdayaan Ekonomi: Program PENA dan Fasilitasi Legalitas Usaha	51
7. Koordinasi Lintas Instansi dan Mediasi Layanan	53
8. Graduasi KPM Menuju Kemandirian	54
BAB III PEMBAHASAN	56
A. Peran Pendamping PKH terhadap dalam mendorong pencapaian SDGs dikemantren Kotagede	56
B. Hasil Peran Pendamping PKH Terhadap Pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede	81
BAB IV PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN-LAMPIRAN	143
Lampiran 1 : Pedoman Wawancara	143
Lampiran 2 : Pedoman Dokumentasi	152
Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian	153
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup	154

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Indikator kemiskinan, kesehatan dan infrastuktur DIY	3
Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Wilayah dan Jenis Kelamin (2025).....	40
Tabel 2. 2 Indikaor sosial ekonomi Kemantren Kotagede 2025	41
Tabel 2. 3 Indikaor kondisi pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial Kotagede	41
Tabel 2. 4 Data Penerima PKH Kemantren Kotagede 2026	45
Tabel 3. 1 Hasil Pembahasan Peran Pendamping PKH dalam Mendorong Pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede.....	130



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1	Pelaksanaan P2K2	65
Gambar 3. 2	Edukasi Pendamping Saat Pertemuan Kelompok PKH	68
Gambar 3. 3	Musyawarah Kelurahan Terkait DTKS/DTSEN.....	72
Gambar 3. 4	Proses Pemutahiran Data KPM PKH	78
Gambar 3. 5	Koordinasi dan Verifikasi Dengan Pihak Sekolah	89
Gambar 3. 6	Pelaksanaan Posyandu Lansia	96
Gambar 3. 7	Pelatihan Kewirausahaan.....	108
Gambar 3. 8	Pendampingan Bantuan Belanja PPSE KPM	110
Gambar 3. 9	Proses Graduasi Mandiri KPM.....	125

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda penting dalam pembangunan nasional karena tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan kesejahteraan sosial, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan menuntut adanya keseimbangan antara dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kebutuhan masyarakat pada masa kini dapat dipenuhi tanpa mengurangi kesempatan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.¹ Dalam konteks global, komitmen tersebut diwujudkan melalui Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yaitu agenda pembangunan dunia yang disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015 dan ditargetkan tercapai pada tahun 2030.²

Indonesia sebagai bagian dari negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa turut mengintegrasikan SDGs dalam kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Namun, implementasi SDGs masih menghadapi berbagai persoalan, terutama kemiskinan, ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi masyarakat rentan. Dalam kaitannya

¹ Nurbaiti dkk, Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4, no. 3 (2024): 741–50, <https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i3.4146>.

² Angelia Maharani dkk, Pengaruh Sustainable Development Goals Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bengkulu Dengan PKH Sebagai Moderating, *Jurnal Manajemen Bisnis Jayakarta* vol. 7, no. 01 (2025), <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v7i01.395>.

dengan Program Keluarga Harapan, tujuan SDGs yang relevan meliputi SDGs 1 tanpa kemiskinan, SDGs 3 kehidupan sehat dan sejahtera, SDGs 4 pendidikan berkualitas, serta SDGs 10 berkurangnya kesenjangan. Keempat tujuan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan tidak cukup dilakukan melalui kebijakan ekonomi makro, melainkan memerlukan program perlindungan sosial yang mampu menjangkau keluarga miskin dan rentan secara langsung.³

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang memiliki perkembangan cukup baik pada berbagai indikator pembangunan sosial. DIY masih menghadapi persoalan kemiskinan, ketimpangan ekonomi, kesenjangan digital, serta persoalan kesehatan keluarga yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin DIY pada Maret 2025 mencapai 10,23 persen atau sekitar 425,82 ribu jiwa. Angka tersebut memang mengalami penurunan dibandingkan September 2024 dan Maret 2024, tetapi masih menjadi persentase kemiskinan tertinggi di Pulau Jawa serta berada di atas rata-rata nasional sebesar 8,47 persen.⁴

Kondisi sosial DIY dapat dilihat melalui beberapa indikator yang berkaitan dengan kemiskinan, kesehatan, ketimpangan, infrastruktur dasar, dan kualitas pembangunan sosial. Indikator tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut.

³ Helin Garlinia Yudawisastra dkk, *Buku Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs)*, (Bandung:Widina Media Utama, 2025).

⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, “Profil Kemiskinan di D.I. Yogyakarta Maret 2025,” diakses 26 Januari 2026, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/1680/profil-kemiskinan-di-d-i-->

Tabel 1. 1 Indikator kemiskinan, kesehatan dan infrastruktur DIY

Indikator	Data	Keterangan
Kemiskinan DIY (Maret 2025)	10,23% (425,82 ribu jiwa)	Menurun 0,17 % dari Sept 2024 dan 0,60 % dari Maret 2024; masih tertinggi di Pulau Jawa, di atas nasional (8,47%).
Sebaran Penduduk Miskin	Perkotaan: 321.040 jiwa Perdesaan: 104.770 jiwa	Jumlah miskin terkonsentrasi di perkotaan meskipun persentase kemiskinan lebih tinggi di perdesaan.
Prevalensi Stunting	2021: 17,1% 2023: 13,8%	Mengalami penurunan, tetapi belum mencapai target Kota Yogyakarta. Februari 2024: Purbayan tertinggi, Wirobrajan terendah; 15 kelurahan belum mencapai target 12%.
Pelayanan Persalinan	56,35%	Persalinan ditangani dokter kandungan.
Indeks Ketimpangan Gender	0,142 (2023)	Terbaik secara nasional dalam kesetaraan gender.
Kepemilikan Telepon Genggam	DIY: 71,37% Kota Yogyakarta: 83,47% Gunungkidul: 57,89%	Menunjukkan kesenjangan digital antarwilayah.
Koefisien Gini	Perkotaan: 0,440 Perdesaan: 0,349	Ketimpangan ekonomi lebih tinggi di wilayah perkotaan.
Infrastruktur Dasar	Listrik: 100% Hunian layak: 85,79%	Akses infrastruktur dasar relatif baik.
Indeks Demokrasi Indonesia	83,88 (2023)	DIY berada pada peringkat ketiga nasional.

Sumber: Diolah dari Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Angka 2025

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa DIY menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa indikator sosial, seperti penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting, tingginya capaian kesetaraan gender, tersedianya akses listrik bagi seluruh rumah tangga, serta capaian demokrasi yang

baik. Perkembangan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat. Tingkat kemiskinan DIY masih tinggi dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Jumlah penduduk miskin lebih banyak terkonsentrasi di wilayah perkotaan dan ketimpangan ekonomi di kawasan perkotaan juga lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan di DIY memiliki karakteristik yang kompleks. Kemiskinan tidak hanya terjadi pada masyarakat perdesaan, tetapi juga menjadi persoalan di wilayah perkotaan yang memiliki biaya hidup tinggi, kebutuhan konsumsi yang besar, serta persaingan ekonomi yang lebih ketat. Fenomena kemiskinan di DIY sering kali dikenal melalui istilah *kere hore*, yaitu ungkapan yang menggambarkan paradoks sosial ketika sebagian masyarakat hidup dalam keterbatasan ekonomi, tetapi tetap memiliki solidaritas sosial, relasi kekeluargaan, serta tingkat kebahagiaan yang cukup baik. Istilah tersebut tidak dimaksudkan untuk membenarkan atau meromantisasi kemiskinan, melainkan menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak hanya diukur melalui pendapatan, tetapi juga melalui kemampuan keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, pangan, perlindungan sosial, dan kehidupan yang layak.⁵

Persoalan kesehatan keluarga juga masih menjadi perhatian dalam pembangunan sosial DIY, khususnya di Kota Yogyakarta. Prevalensi stunting di Kota Yogyakarta memang mengalami penurunan dari 17,1 persen pada tahun 2021 menjadi 13,8 persen pada tahun 2023. Capaian tersebut masih belum memenuhi

⁵ Pajar Hatma Indra Jaya, “*Kere Hore* Yogya, Fakta atau Mitos?,” *Kedaulatan Rakyat*, 1 Februari 2023, dimuat ulang oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 9 Februari 2023.

target yang ditetapkan pemerintah kota. Kelurahan Purbayan yang berada di wilayah Kemantren Kotagede tercatat memiliki prevalensi stunting tertinggi pada Februari 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan gizi keluarga, pola pengasuhan anak, kesadaran kesehatan, serta akses keluarga terhadap layanan kesehatan masih memerlukan perhatian melalui program perlindungan sosial dan pendampingan yang berkelanjutan.⁶

Berdasarkan data rasio gini, yang merupakan alat ukur statistik untuk menilai tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dengan rentang nilai 0 (pemerataan sempurna) hingga 1 (ketimpangan ekstrem), menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi di wilayah perkotaan DIY mencapai angka 0,440, sedangkan di wilayah perdesaan sebesar 0,349. Data tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi perkotaan belum sepenuhnya menghasilkan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh kelompok masyarakat. Meskipun Kota Yogyakarta memiliki tingkat kepemilikan telepon genggam yang tinggi, yaitu sebesar 83,47 persen, kesenjangan digital antarwilayah masih tetap terlihat. Kondisi tersebut penting diperhatikan karena akses terhadap informasi, layanan digital, administrasi kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial semakin banyak memanfaatkan teknologi informasi.⁷ Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan berkelanjutan di DIY membutuhkan program perlindungan

⁶ Najla Hikmalia Dhiyaa Ulhaq et al., "Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Balita Stunting Di Umbulharjo, Yogyakarta," *JISHUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 517–26, <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i4.406>.

⁷ Badan Pusat Statistik Provinsi DI Yogyakarta, "Indikator Pembangunan Berkelanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta 2023/2024," accessed November 12, 2025, <https://yogyakarta.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/8e18cde32cdda6878555490e/indikator-pembangunan-berkelanjutan-daerah-istimewa-yogyakarta-2023-2024.html>.

sosial yang tidak hanya berupa bantuan ekonomi, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kapasitas keluarga, perubahan perilaku, akses layanan dasar, serta penguatan kemandirian sosial ekonomi masyarakat. Salah satu program perlindungan sosial yang memiliki keterkaitan kuat dengan pencapaian SDGs adalah Program Keluarga Harapan (PKH).

PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang dikembangkan oleh pemerintah untuk membantu keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan dasar. PKH mencakup komponen pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, disabilitas, dan lanjut usia. Program ini tidak hanya bertujuan mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat, tetapi juga mendorong keluarga untuk memastikan anak memperoleh akses pendidikan, ibu dan anak memperoleh layanan kesehatan, lansia serta penyandang disabilitas memperoleh perlindungan sosial, dan keluarga mampu meningkatkan kualitas hidupnya secara bertahap.⁸

Kemantren Kotagede merupakan salah satu wilayah di Kota Yogyakarta yang menjadi sasaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Pelaksanaan PKH di wilayah tersebut mencakup Kelurahan Purbayan, Rejowinangun, dan Prenggan. Berdasarkan data penerima PKH tahun 2025, terdapat sebanyak 1.003 Keluarga Penerima Manfaat di Kemantren Kotagede.⁹ Jumlah tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat keluarga yang membutuhkan dukungan perlindungan sosial, akses pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan administrasi sosial, serta penguatan

⁸ Putri Erika Ramadhani and Nandang Mulyana, Peran Pendamping Dalam Pengembangan Usaha Kelompok Binaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Desa Lebakagung Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut, *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* vol. 2, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27049>.

⁹ Hasil Wawancara Pra Survei, dengan Ibu Erlin Dwi Kusumawati, Senin 22 Oktober 2025, 08.00 WIB, Kemantren Kotagede.

kapasitas keluarga dalam menghadapi persoalan sosial dan ekonomi.¹⁰ Keberhasilan PKH tidak hanya ditentukan oleh jumlah bantuan yang diterima Keluarga Penerima Manfaat. Keberhasilan program juga bergantung pada kualitas proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping PKH. Pendamping memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara pemerintah dengan KPM dalam memberikan informasi, memfasilitasi akses layanan, membantu proses administrasi, membangun motivasi, mendorong partisipasi, serta mengarahkan keluarga penerima manfaat agar memahami hak dan kewajibannya dalam program. Pendamping juga berperan penting dalam mendorong agar bantuan sosial tidak hanya dipahami sebagai bantuan tunai, melainkan sebagai sarana peningkatan kapasitas dan kemandirian keluarga.¹¹

Melihat urgensinya peran yang dijalankan oleh pendamping PKH dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai bagaimana peran pendamping PKH yang berkontribusi dalam mendorong pencapaian SDGs di tingkat lokal. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti peran pendamping yang termuat dalam judul penelitian “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mendorong Pencapaian Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta.”

¹⁰ Phina Karina dan Amin Yusuf, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, vol. 5, no. 1 (2025), <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i1.5729>.

¹¹ A. Rochmah Deiffy Amalia, A. Subowo dan R. S. Santoso, Peran Pendamping Sosial Dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, *Journal of Public Policy and Management Review*, vol. 13, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.45301>.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta?
2. Bagaimana hasil pendamping PKH dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis peran pendamping Program Keluarga Harapan dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kemantren Kotagede Yogyakarta.
2. Mengetahui hasil peran pendamping PKH terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian memperkaya wacana akademik

mengenai peran pendamping sosial dalam implementasi PKH yang berorientasi pada pencapaian SDGs, serta memperluas pemahaman teoritis tentang keterkaitan antara program perlindungan sosial dan agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan konsep terkait efektivitas peran pendamping sosial dalam mendukung pencapaian pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pendamping PKH sebagai dasar refleksi dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas perannya dalam mendukung pencapaian indikator SDGs, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial Kota Yogyakarta, hasil penelitian dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam memperkuat peran pendamping sosial. Penelitian ini juga menyediakan landasan empiris bagi akademisi dan peneliti dalam mengembangkan kajian lanjutan mengenai hubungan antara program perlindungan sosial dan pembangunan berkelanjutan pada konteks lokal.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dilakukan dengan menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik. Studi tentang PKH sudah banyak dilakukan dan aspek kajiannya sudah cukup beragam. Peneliti mengambil tema mengenai "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mendorong Pencapaian

Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta”.

Dari tema tersebut penulis melakukan kajian pustaka dan menemukan beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang peran pendamping PKH dan SDGs. Penelitian tersebut mempunyai hubungan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Peneliti memaparkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dimuat dalam jurnal berjudul “Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai SDG’s di Kemantren Kaliwungu Selatan” oleh Ika Rini Harmonis dan Abdul Malik menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplorasi yang melibatkan observasi dan wawancara mendalam untuk menggali peran pendamping PKH dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. Temuan utama penelitian ini menegaskan bahwa pendamping PKH memiliki peranan strategis dalam memberdayakan keluarga penerima manfaat melalui pembinaan dan pengarahan yang intensif, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga serta mendukung indikator SDGs seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan mutu pendidikan, dan kesetaraan gender.¹²

Penelitian yang dilakukan Ika Rini Harmonis dan Abdul Malik sama dengan penelitian ini. Objek penelitiannya sama-sama mengkaji peran pendamping PKH berbasis SDGs. Terdapat perbedaan pada lokasi penelitiannya. Jurnal tersebut meneliti peran pendamping PKH di Kemantren Kaliwungu Selatan, sedangkan

¹² Ika Rini Harmonis dan Abdul Malik, Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai SDG’s Di Kecamatan Kaliwungu Selatan, *Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, vol. 2, no. 3 (2024): 107–24, <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.101>.

penelitian ini di wilayah Kemantren Kotagede Kota Yogyakarta, yang memiliki karakteristik sosial, budaya, dan dinamika lokal yang berbeda sehingga memengaruhi efektivitas dan strategi pendampingan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Kedua, penelitian yang dimuat dalam jurnal berjudul “Program Keluarga Harapan dalam Kerangka *Sustainable Development Goals* (SDGs): Kajian Literatur Kontribusinya terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan” oleh Dede Damayanti, Titi Stiawati dan Arenawati. Menemukan bahwa Program Keluarga Harapan memiliki dampak positif signifikan dalam penurunan kemiskinan ekstrem, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Temuan ini menegaskan keselarasan PKH dengan prinsip-prinsip SDGs, khususnya dalam aspek keadilan sosial, inklusi, dan pemberdayaan masyarakat. Kajian ini memberikan landasan penting bahwa PKH sebagai program sosial-ekonomi strategis berkontribusi pada pencapaian target SDGs melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.¹³

Ketiga, penelitian yang dimuat dalam artikel berjudul “Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sumberkepuh Kemantren Tanjunganom Kabupaten Nganjuk”, dengan metode kualitatif deskriptif menegaskan peran penting pendamping PKH sebagai jembatan antara masyarakat penerima manfaat dan pemerintah. Pendamping tidak hanya melakukan pendataan dan penyaluran bantuan, tetapi juga aktif memberikan motivasi, pelatihan, dan

¹³ Dede Damayanti dkk, Program Keluarga Harapan Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Literatur Terhadap Kontribusinya Terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, vol. 4, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8698>.

meningkatkan kesadaran masyarakat untuk optimalisasi manfaat PKH. Temuan ini menegaskan peran multifungsi pendamping sebagai motivator dan fasilitator penting dalam pengentasan kemiskinan melalui PKH.¹⁴

Keempat, artikel berjudul “Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kemantren Taman Kabupaten Pemalang”, menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping PKH berperan strategis sebagai fasilitator, edukator, perwakilan, dan teknisi dalam meningkatkan kesejahteraan KPM. Tugas pendamping meliputi sosialisasi kebijakan, pengelolaan administrasi bantuan, pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, serta memperjuangkan aspirasi KPM. Keberhasilan program didukung sinergi pemerintah dan pemangku kepentingan, meskipun terdapat kendala rendahnya partisipasi dan ketidakjujuran pelaporan ekonomi. Temuan menegaskan efektivitas pendamping bergantung pada kualitas interaksi, komitmen, dan integritas antara pendamping dan penerima manfaat untuk mewujudkan tujuan pengentasan kemiskinan.¹⁵

Kelima, penelitian berjudul “Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial)”

¹⁴ Putri Nur Azizah dan Ananta Prathama, Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk, *Journal Publicuho*, vol. 7, no. 2 (2024): 695–704, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410>.

¹⁵ Phina Karina dan Amin Yusuf, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, vol. 5, no. 1 (2025): 64–81, <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i1.5729>.

menggunakan metode kualitatif studi kasus untuk menggali peran pendamping PKH dalam membantu penerima manfaat mencapai peningkatan kesejahteraan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi partisipatif terhadap pendamping PKH dengan latar belakang kesejahteraan sosial dan nonkesejahteraan sosial. Temuan utama menunjukkan bahwa pendamping sosial berkontribusi signifikan dalam proses graduasi sosial ekonomi dengan strategi adaptif sesuai latar belakang pengetahuan dan keterampilan mereka. Pendamping berlatar kesejahteraan sosial menerapkan pendekatan sistematis dan berorientasi pemberdayaan, sementara berlatar nonkesejahteraan sosial lebih fokus pada motivasi dan fasilitasi komunikasi.¹⁶

Berdasarkan kajian pustaka dari penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai peran pendamping PKH dalam kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) belum secara spesifik menganalisis peran pendamping PKH dengan menggunakan kerangka teori peran sebagaimana dikemukakan oleh Jim Ife dan Frank Tesoriero, yang fungsi untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif mengenai fungsi, relasi, serta kontribusi pendamping sosial dalam proses pemberdayaan masyarakat.¹⁷

Sejalan dengan celah tersebut, penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian dengan menerapkan teori peran menurut Ife dan Tesoriero sebagai landasan analisis dalam memahami bagaimana peran serta hasil

¹⁶ Dewi Komalasari dan Fentiny Nugroho, Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi Pada Pendamping Sosial Dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial Dan Nonkesejahteraan Sosial), *Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, vol. 17, no. 5 (2023): 3182, <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2632>.

¹⁷ Jim Ife dkk, *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi* (Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 558).

pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede. Pendekatan ini tidak hanya memperluas perspektif akademik yang belum disentuh oleh penelitian sebelumnya, tetapi juga memperdalam analisis mengenai strategi pendamping, hambatan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap perubahan sosial-ekonomi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam konteks lokal Kotagede.

F. Kajian Teori

1. *Sustainable Development Goals* (SDGs)

SDGs adalah hasil dari kesepakatan global yang lahir melalui Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan di Rio de Janeiro, Brasil, pada tahun 2012, yang dikenal dengan sebutan *Rio+20*. Rio+20 tahun 2012 merupakan forum yang memulai mandat perumusan SDGs, sedangkan SDGs secara resmi diadopsi oleh negara-negara anggota PBB pada September 2015 melalui *Agenda 2030*. Agenda tersebut memuat 17 tujuan dan 169 target yang bersifat saling terhubung serta menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan.¹⁸

Tujuan-tujuan dalam SDGs mencakup berbagai bidang strategis seperti kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, kesetaraan gender, dan pelestarian lingkungan hidup. Melalui *Agenda 2030 for Sustainable Development*, SDGs berfungsi sebagai pedoman global bagi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Seiring dengan dinamika global, SDGs terus mengalami

¹⁸ Helin Garlinia Yudawisastra dkk, *Buku Pengembangan Sustainable Development Goals (SDGs)*, (Bandung, Widina Media Utama, 2025) hlm. 3

penyesuaian tanpa mengubah nilai dasar dan prinsip utamanya, yaitu menciptakan dunia yang lebih adil, makmur, dan berkelanjutan bagi seluruh umat manusia. Sebagai bagian dari komunitas internasional, Indonesia turut berkomitmen untuk mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.¹⁹

SDGs mencakup 17 tujuan utama dirancang guna mengatasi berbagai tantangan global yang bersifat kompleks yaitu: (1) tanpa kemiskinan; (2) tanpa kelaparan; (3) kehidupan sehat dan sejahtera; (4) pendidikan berkualitas; (5) kesetaraan gender; (6) air bersih dan sanitasi layak; (7) energi bersih dan terjangkau; (8) pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi; (9) industri, inovasi dan infrastruktur; (10) berkurangnya kesenjangan; (11) kota dan permukiman yang berkelanjutan; (12) konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab; (13) penanganan perubahan iklim; (14) ekosistem lautan; (15) ekosistem daratan; (16) perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh; (17) kemitraan untuk mencapai tujuan.²⁰

Dalam penelitian ini, konsep SDGs digunakan bukan sebagai teori utama, melainkan sebagai kerangka normatif dan analitis untuk membingkai serta menilai sejauh mana peran pendamping PKH berkontribusi terhadap pencapaian pembangunan sosial secara berkelanjutan. Kerangka SDGs membantu peneliti melihat bahwa tugas pendamping tidak hanya berkaitan dengan pendampingan administrasi maupun penyaluran bantuan, tetapi juga mencakup upaya mendorong

¹⁹ Helin G. Yudawisastra dkk, The Role of Green Entrepreneurship and Green Variables in Sustainable Development in the Culinary Sector in Indonesia: Early Days of the COVID-19 Pandemic, *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, vol.6, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.28992/ijssam.v6i2.689>.

²⁰ Najmatul Haya Zen dan Lince Mageiasti, Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi, *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, vol. 3, no. 1 (January 2025), <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1316>.

keluarga penerima manfaat agar mampu mengakses layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kapasitas keluarga. Dengan demikian, peran pendamping PKH dapat dianalisis kontribusinya terhadap pencapaian SDG 1 tanpa kemiskinan, SDG 2 tanpa kelaparan, SDG 3 kehidupan sehat dan sejahtera, SDG 4 pendidikan berkualitas, serta SDG 10 berkurangnya kesenjangan. Konsep SDGs dalam penelitian ini berfungsi sebagai sudut pandang untuk menilai apakah pendampingan PKH telah mendorong perubahan sosial yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memperkuat kemandirian dan kesejahteraan keluarga penerima manfaat dalam jangka panjang.²¹

Penelitian Nurbaiti dkk. Menjelaskan hasil pemberdayaan masyarakat melalui PKH dapat dikatakan berhasil apabila mampu mendorong perubahan pada beberapa target SDGs yang relevan, terutama pengurangan kemiskinan, peningkatan akses kesehatan, pendidikan, dan pengurangan kesenjangan sosial. Hasil penelitian tersebut memperkuat temuan pada penelitian saya.²²

2. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori peran (*role theory*) merupakan perspektif yang digunakan untuk memahami perilaku individu berdasarkan kedudukan, fungsi, serta harapan sosial yang melekat pada dirinya. Konsep peran berangkat dari analogi dunia teater, yaitu individu dipandang sebagai aktor yang menjalankan perilaku tertentu sesuai dengan

²¹ Udo E. Simonis, The Age of Sustainable Development, *International Journal of Social Economics*, vol. 44, no. 12 (2017): 2500–2502, <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2016-0224>.

²² Nurbaiti dkk., Konsep Sustainable Development (Pembangunan Berkelanjutan) Berbasis Sosial Dan Ekonomi Terhadap Perlindungan Sumber Daya Alam Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)* 4, no. 3 (2024): 742, <https://doi.org/10.36987/jumsi.v4i3.4146>.

posisi sosial yang dimilikinya. Peran tidak hanya berkaitan dengan jabatan atau status seseorang, tetapi juga mencakup seperangkat hak, kewajiban, sikap, dan tindakan yang diharapkan oleh lingkungan sosial. Dalam pelaksanaan program sosial, teori peran penting digunakan untuk melihat sejauh mana individu yang diberi tanggung jawab mampu menjalankan fungsi sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan masyarakat.²³

Dalam konteks PKH, pendamping merupakan sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial untuk melaksanakan proses pendampingan kepada KPM pada tingkat wilayah kerja. Pendamping PKH tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana administratif atau penghubung dalam penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk membimbing, memfasilitasi, memotivasi, memantau, dan mengadvokasi KPM agar mampu memenuhi komitmen program serta meningkatkan kualitas hidupnya.²⁴ Pendamping PKH dapat dipahami sebagai agen perubahan sosial yang menjembatani kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata masyarakat penerima manfaat.²⁵

Teori peran pendamping dalam penelitian ini mengacu pada pemikiran Jim Ife dan Frank Tesoriero mengenai peran pekerja masyarakat dalam proses pengembangan masyarakat. Menurut Ife dan Tesoriero, pekerja masyarakat

²³ Edy Suhardono, *TEORI PERAN Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio- Digital* (Zifatama Jawara, 2025). hlm. 3

²⁴ Maulida Eka Putri Sompie, Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kecamatan Sungai Serut, *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, vol. 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2210>.

²⁵ Sri Ratna Ningrum dkk, Refleksi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut untuk Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan, *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, vol. 14, no. 2 (2025), <https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3567>.

menjalankan empat kelompok peran utama, yaitu peran fasilitatif (*facilitative roles*), peran edukatif (*educational roles*), peran representatif (*representational roles*), dan peran teknis (*technical roles*). Keempat peran tersebut saling berkaitan dan dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana pendamping PKH menjalankan fungsi sosialnya dalam mendorong KPM menuju kondisi yang lebih berdaya, mandiri, serta mampu mengakses layanan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan peluang peningkatan kesejahteraan.²⁶

a. Peran Fasilitatif (*Facilitative Roles*)

Peran fasilitasi mencakup berbagai bentuk tindakan yang berfokus pada pemberian stimulasi dan dukungan terhadap proses pengembangan masyarakat. Dalam peran ini, pekerja sosial menggunakan beragam teknik untuk mempermudah proses pemberdayaan, mempercepat aksi, dan menjaga kelancaran dinamika kolektif. Peran-peran spesifik dalam kategori fasilitasi meliputi animator (semangat) sosial, mediasi dan negosiasi, pemberian dukungan, pembangunan konsensus, fasilitasi kelompok, pemanfaatan keterampilan serta sumber daya, dan mengorganisasi.²⁷

Semangat sosial menjadi fondasi untuk membangkitkan motivasi dan partisipasi kolektif, sementara keterampilan mediasi dan negosiasi diperlukan untuk mengelola perbedaan kepentingan dan merumuskan titik temu. Dukungan diberikan untuk meningkatkan kepercayaan diri warga yang rentan, sedangkan pembangunan konsensus diarahkan untuk menyatukan pandangan yang beragam.

²⁶ Jim Ife dkk, *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*, 3rd ed. (Bandung, Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 558

²⁷ Ife et al., *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 558-559

Fasilitasi kelompok memungkinkan pelaksanaan berbagai kegiatan secara terstruktur dan efektif, dan pemanfaatan keterampilan serta sumber daya lokal memastikan kapasitas masyarakat dapat dioptimalkan. Kemampuan mengorganisasi dan berkomunikasi juga menjadi aspek krusial, karena pendamping harus mampu menetapkan prioritas, mengatur tugas, serta menjalin komunikasi yang efektif dengan seluruh pihak yang terlibat. Seluruh peran tersebut berfungsi untuk memperkuat proses pemberdayaan dan meningkatkan efektivitas dinamika sosial dalam masyarakat.²⁸

b. Peran Edukasi (*Educational Roles*)

Berbagai peran mendidik dalam pengembangan masyarakat menempatkan pekerja sosial sebagai aktor yang tidak sekadar memfasilitasi proses, tetapi juga memberikan kontribusi pengetahuan, keterampilan, dan arahan yang relevan bagi komunitas. Peran edukatif ini mencakup peningkatan kesadaran kritis, penyediaan informasi, konfrontasi yang konstruktif, serta pelatihan sesuai kebutuhan masyarakat. Inti dari peran ini adalah memastikan bahwa proses belajar bersifat dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, bukan dipaksakan oleh pihak luar. Pekerja masyarakat harus mampu membantu komunitas mengidentifikasi kebutuhan belajar mereka, mengarahkan pemahaman atas struktur sosial yang memengaruhi kehidupan mereka, serta memberikan akses pada informasi penting untuk pengambilan keputusan kolektif. Pelatihan hanya efektif apabila lahir dari permintaan masyarakat dan dirancang sesuai konteks sosial-

²⁸ Ife et al., *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 559-580

budaya setempat. Dengan demikian, peran mendidik menjadi instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas komunitas, mendorong kemandirian, dan menghindari praktik dominasi dalam proses pemberdayaan.²⁹



²⁹ Ife et al., *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 580-591

c. Peran Perwakilan (*Representational roles*)

Peran representasi yang dijalankan pekerja masyarakat mencakup upaya memperoleh sumber daya, melakukan advokasi, memanfaatkan media, menjalankan fungsi humas dan presentasi publik, membangun jaringan kerja, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman. Peran tersebut menuntut kemampuan pekerja untuk menghubungkan masyarakat dengan sistem yang lebih luas, dengan tetap menjaga prinsip kemandirian dan pemberdayaan komunitas. Dalam memperoleh sumber daya, pekerja berfungsi sebagai penghubung informasi, keahlian, dan dukungan yang relevan, sekaligus mempertimbangkan risiko ketergantungan pada bantuan eksternal. Pada aspek advokasi, pekerja mewakili kepentingan kelompok rentan dengan tetap menempatkan pemberdayaan sebagai tujuan utama. Pemanfaatan media dan presentasi publik menjadi sarana strategis untuk mengangkat isu, membangun dukungan, dan memperluas jangkauan informasi. Pekerja masyarakat juga dituntut membangun jaringan kerja lintas sektor untuk memperkuat kolaborasi, tanpa menciptakan elit baru yang berpotensi mendominasi proses pemberdayaan.³⁰

d. Peran Teknis (*Technical roles*)

Peran teknis pengembangan masyarakat mencakup keterampilan praktis yang diperlukan untuk mendukung efektivitas proses pemberdayaan, seperti penelitian, penggunaan teknologi informasi, kemampuan presentasi, manajemen organisasi, serta pengelolaan keuangan. Meskipun pengembangan masyarakat tidak

³⁰ Ife et al., *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 591-603

sepenuhnya bersifat teknis, pekerja masyarakat tetap dituntut menguasai kemampuan dasar untuk merancang dan melaksanakan penelitian sosial, mengolah data, menyusun laporan, serta menyampaikan informasi secara jelas dan komunikatif. Mereka perlu memahami prinsip manajemen partisipatif untuk membantu masyarakat mengelola organisasi dan programnya secara mandiri, sekaligus memastikan adanya sistem akuntabilitas keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kompetensi teknis tersebut tidak harus dikuasai secara sempurna oleh pekerja masyarakat, tetapi dapat dikembangkan melalui pengalaman, pelatihan, dan kolaborasi dengan sumber daya lain, selama tetap berorientasi pada keberdayaan dan kepemilikan masyarakat dalam setiap proses pengembangan.³¹

Berdasarkan uraian tersebut, teori peran Jim Ife dan Frank Tesoriero digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk mengkaji peran pendamping PKH di Kemantren Kotagede Yogyakarta. Analisis penelitian diarahkan pada empat indikator utama, yaitu: pertama, peran fasilitatif dalam mendorong partisipasi dan mempermudah akses KPM. Kedua, peran edukatif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran KPM. Ketiga, peran representatif dalam membangun akses serta jaringan layanan dan keempat, peran teknis dalam mendukung pengelolaan, pemantauan, serta administrasi program. Melalui empat indikator tersebut, penelitian dapat menjelaskan secara lebih komprehensif kontribusi pendamping PKH dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan

³¹ Ife et al., *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*, 3rd ed. (Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 603-615

berkelanjutan, khususnya pada aspek pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pengurangan kesenjangan, dan kesejahteraan sosial.

3. Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*)

Kesejahteraan sosial merupakan konsep penting dalam penelitian mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) karena program ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui bantuan sosial, akses layanan dasar, dan pendampingan. Kesejahteraan sosial tidak hanya dimaknai sebagai terpenuhinya kebutuhan ekonomi, tetapi sebagai kondisi kehidupan yang memungkinkan individu, keluarga, dan masyarakat memenuhi kebutuhan jasmaniah, rohaniyah, dan sosial secara layak, aman, serta bermartabat.³² Kesejahteraan sosial dalam penelitian ini dipahami sebagai tujuan sekaligus proses untuk meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Menurut Edi Suharto, kesejahteraan sosial memiliki tiga pengertian utama. Pertama, sebagai kondisi sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Kedua, sebagai institusi atau arena pelayanan sosial yang melibatkan pemerintah, lembaga sosial, serta tenaga profesional dalam menangani persoalan masyarakat. Ketiga, sebagai aktivitas terorganisasi untuk mencegah, mengatasi, dan mengurangi masalah sosial.³³ Dengan pengertian tersebut, kesejahteraan sosial tidak hanya menilai hasil

³² Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014). hlm 1-3.

³³ Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014). hlm 2-3.

akhir berupa kondisi hidup masyarakat, tetapi juga melihat keberadaan sistem pelayanan dan upaya sosial yang mendukung tercapainya kondisi tersebut.

Dalam perspektif pembangunan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas hidup masyarakat perlu dilakukan secara terintegrasi melalui penguatan modal ekonomi, modal manusia, modal kemasyarakatan, dan modal perlindungan. Modal ekonomi berkaitan dengan kemampuan keluarga memperoleh serta mengelola sumber penghidupan, modal manusia berkaitan dengan peningkatan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual modal kemasyarakatan berhubungan dengan kepercayaan, jaringan, dan partisipasi sosial sedangkan modal perlindungan berkaitan dengan rasa aman serta jaminan sosial bagi kelompok rentan.³⁴ Kerangka tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak dapat diukur hanya melalui pendapatan, melainkan juga melalui kemampuan keluarga mengakses pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, jaringan dukungan, dan kesempatan untuk berkembang.

Pembangunan kesejahteraan sosial bertujuan meningkatkan standar hidup, keberdayaan, dan kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan hidupnya. Peningkatan standar hidup dilakukan melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial, terutama bagi kelompok miskin dan rentan. Peningkatan keberdayaan dilakukan dengan memperkuat sistem ekonomi, sosial, dan politik yang menghargai martabat manusia. Sementara itu, penyempurnaan kebebasan dilakukan melalui perluasan akses masyarakat terhadap layanan, kesempatan, dan sumber daya yang sesuai

³⁴ Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014). hlm 4.

dengan kebutuhan serta potensinya.³⁵ Dalam konteks ini, kesejahteraan sosial mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, perlindungan sosial, akses pelayanan, partisipasi, pemberdayaan, dan keadilan sosial. Kesejahteraan sosial juga berkaitan erat dengan perlindungan sosial. Perlindungan sosial dapat berbentuk formal, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial yang diselenggarakan negara, maupun informal, seperti dukungan keluarga, komunitas, kelompok sosial, usaha produktif, dan jaringan pengaman sosial lokal.³⁶ PKH merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial formal yang tidak hanya memberikan bantuan kepada KPM, tetapi juga mendorong mereka untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, kesehatan ibu dan anak, pengasuhan keluarga, serta peningkatan kapasitas ekonomi. Keberhasilan PKH tidak hanya dilihat dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari perubahan kondisi dan perilaku KPM menuju kehidupan yang lebih mandiri.

Dalam penelitian ini, kesejahteraan sosial digunakan untuk memahami hasil dari peran pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede. Pendamping memiliki posisi strategis karena membantu KPM memperoleh informasi, mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, memahami kewajiban program, memanfaatkan bantuan secara tepat, serta mengembangkan

³⁵ Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014). hlm 5.

³⁶ Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014). hlm 8-9.

kemampuan keluarga. Peran tersebut selaras dengan fungsi pendampingan sosial, yaitu pemungkinan atau fasilitasi, penguatan, perlindungan, dan pendukung.³⁷

4. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep yang berangkat dari gagasan tentang *power* atau keberdayaan, yaitu kemampuan individu maupun kelompok terutama kelompok rentan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, menjangkau sumber-sumber produktif, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang memengaruhi hidupnya. Karena itu, pemberdayaan tidak hanya dimaknai sebagai bantuan dari luar, melainkan sebagai proses perubahan yang menguatkan modal sosial, pengetahuan, sumber daya, dan kemandirian masyarakat.³⁸ Tujuan pemberdayaan pada dasarnya adalah membentuk masyarakat yang mandiri, meningkatkan motivasi, inisiatif, dan kemampuan bertindak, serta menghasilkan perbaikan kelembagaan, usaha, pendapatan, lingkungan, taraf hidup, dan kualitas kehidupan bersama.³⁹

Indikator masyarakat berdaya dapat dilihat melalui lima aspek. Secara ekonomi, yang merupakan dimensi paling mendasar karena berkaitan langsung dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Indikator ini tercermin dari kemampuan individu atau keluarga untuk memperoleh pendapatan yang layak, baik melalui pekerjaan formal, usaha mandiri, maupun sumber penghasilan lain. Selain

³⁷ Edi Suharto, *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, 4th ed. (Bandung: Refika Aditama, 2014). hlm 93-105.

³⁸ La Patilaya, Hairudin, et al. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 2-3.

³⁹ La Patilaya, Hairudin, et al. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 9-11.

itu, keberdayaan ekonomi juga terlihat dari kemampuan mengakses aset produktif (seperti lahan, modal usaha, atau alat produksi), keterlibatan dalam mekanisme pasar (misalnya kemampuan menjual hasil produksi atau mengakses informasi harga), serta akses terhadap layanan keuangan formal seperti perbankan, koperasi, atau lembaga keuangan mikro.⁴⁰ Dalam konteks KPM PKH, aspek ini dapat dilihat dari sejauh mana bantuan sosial dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dan bukan hanya untuk konsumsi jangka pendek.

Secara sosial, menekankan pada kualitas relasi dan keterlibatan individu dalam kehidupan bermasyarakat. Indikatornya mencakup tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan, luasnya jaringan sosial yang dimiliki (baik dengan sesama warga, kelompok masyarakat, maupun lembaga terkait), serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat rumah tangga (misalnya dalam pengelolaan keuangan keluarga) maupun di tingkat komunitas (seperti musyawarah dusun atau kegiatan P2K2). Semakin besar keterlibatan seseorang dalam proses sosial ini, semakin tinggi tingkat keberdayaan sosialnya, karena menunjukkan bahwa suara dan perannya diakui dalam struktur sosial di sekitarnya.⁴¹

Secara politik, Keberdayaan politik tidak selalu berarti keterlibatan dalam politik praktis, melainkan lebih pada kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Indikator ini meliputi kesadaran hukum (memahami hak-hak dasar dan prosedur untuk mendapatkannya), kemampuan menyampaikan aspirasi atau

⁴⁰ La Patilaya, Hairudin, et al. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 17.

⁴¹ La Patilaya, Hairudin, et al. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 17.

keluhan kepada pihak yang berwenang (misalnya menyampaikan aduan layanan sosial), serta kesediaan dan kapasitas untuk terlibat dalam tindakan kolektif, seperti advokasi bersama atau partisipasi dalam forum-forum warga. Aspek ini penting karena menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek pasif penerima kebijakan, tetapi juga subjek yang mampu memperjuangkan kepentingannya sendiri.⁴²

Secara psikologis, aspek ini berkaitan dengan kondisi internal atau mental individu yang menjadi fondasi bagi keberdayaan di aspek-aspek lain. Indikatornya mencakup rasa percaya diri dalam menghadapi persoalan hidup, keberanian mengambil keputusan tanpa selalu bergantung pada pihak lain, serta kemampuan mengendalikan diri (*self-control*) dalam menghadapi tekanan atau godaan, misalnya dalam pengelolaan keuangan agar tidak konsumtif. Aspek psikologis sering dianggap sebagai prasyarat keberdayaan, karena tanpa kepercayaan diri dan keberanian mengambil keputusan, perubahan pada aspek ekonomi, sosial, maupun politik akan sulit terwujud secara berkelanjutan.⁴³

Secara kapasitas, Aspek ini menyoroti kemampuan teknis dan kognitif yang dimiliki individu untuk beradaptasi dan berkembang. Indikatornya meliputi tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, kemampuan memecahkan masalah (*problem-solving*) secara mandiri, kejelian dalam memanfaatkan peluang yang ada di sekitarnya, serta kemampuan merencanakan masa depan secara lebih terarah, misalnya merencanakan pendidikan anak atau merintis usaha kecil. Aspek kapasitas

⁴² La Patilaya, Hairudin, et al. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 18.

⁴³ La Patilaya, Hairudin, et al. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 18.

ini menjadi penentu keberlanjutan keberdayaan, karena masyarakat yang memiliki kapasitas memadai akan lebih mampu bertahan dan berkembang secara mandiri meskipun tanpa pendampingan yang terus-menerus.⁴⁴

Iima indikator masyarakat berdaya tersebut menjadi dasar untuk melihat sejauh mana pendampingan PKH tidak hanya berhenti pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga mampu mendorong perubahan pada KPM secara lebih menyeluruh. Dalam konteks penelitian ini, keberhasilan peran pendamping PKH di Kemantren Kotagede dapat dilihat dari perubahan ekonomi keluarga, meningkatnya partisipasi sosial, tumbuhnya kesadaran terhadap hak dan layanan publik, meningkatnya kepercayaan diri, serta bertambahnya kemampuan KPM dalam mengelola bantuan, mengakses pendidikan dan kesehatan, serta merencanakan kehidupan keluarga secara lebih mandiri. Indikator keberdayaan tersebut relevan digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bagaimana hasil peran pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede, khususnya pada tujuan pengentasan kemiskinan, kesehatan yang baik, pendidikan berkualitas, dan berkurangnya kesenjangan sosial.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami secara mendalam makna, proses, serta peran sosial pendamping PKH dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren

⁴⁴ La Patilaya, Hairudin, et al. *Pemberdayaan Masyarakat*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hlm 19.

Kotagede, Yogyakarta. Penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diatributkan oleh individu maupun kelompok dalam suatu masalah sosial.⁴⁵ Pendekatan ini relevan karena peneliti ingin menggali pengalaman, dan pandangan pendamping PKH secara kontekstual dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi di lapangan secara mendalam, sistematis, dan faktual tanpa memanipulasi variabel yang ada. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami realitas sosial sebagaimana adanya dari perspektif partisipan penelitian.⁴⁶

Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mempelajari secara mendalam konteks sosial pendamping PKH dalam mengimplementasikan tugasnya dan kontribusinya terhadap capaian SDGs di tingkat lokal. Dengan kombinasi pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai realitas empiris dan makna sosial dari peran pendamping PKH di lapangan.

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan mendapatkan pemahaman mendalam dan komprehensif terkait fenomena yang diteliti.⁴⁷ Penelitian ini meneliti bagaimana

⁴⁵ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (SAGE Publications, 2017), hlm. 144

⁴⁶ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 4

⁴⁷ Yanto Syafri dkk, *Metodologi Penelitian Mengintegrasikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan Mix Methods*, (Kota Medan: Media Penerbit Indonesia, 2025).

peran dan hasil pendamping PKH dalam mendorong Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta dengan berfokus pada teori peran dari Jim Ife dan Frank Tesoriero dengan didukung Teori Kesejahteraan Sosial (*Social Welfare Theory*) dan Teori Pemberdayaan (*Empowerment Theory*).

a. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kemantren Kotagede, Yogyakarta. Subjek penelitian terdiri atas tiga pendamping PKH dan tiga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pendamping PKH dipilih karena memiliki peran langsung dalam pelaksanaan pendampingan, pemberian edukasi, fasilitasi akses layanan, serta pemantauan perkembangan KPM. Sementara itu, KPM dipilih untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman mereka dalam menerima pendampingan dan manfaat Program Keluarga Harapan.

Objek penelitian ini adalah peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di Kemantren Kotagede, Yogyakarta. Penelitian difokuskan pada pelaksanaan peran pendamping dalam membantu KPM memperoleh akses pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta peningkatan kapasitas dan kemandirian keluarga.

b. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan Program

Keluarga Harapan di Kemantren Kotagede. Informan penelitian berjumlah 10 orang, yang terdiri atas tiga pendamping PKH, yaitu Erlin Dwi Kusumawati selaku pendamping PKH Kelurahan Purbayan, Andiko Suryo Aji selaku pendamping PKH Kelurahan Rejowinangun, dan Indah Maya Sari selaku pendamping PKH Kelurahan Prenggan.

Selain pendamping PKH, penelitian ini juga melibatkan 7 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai informan. KPM dipilih berdasarkan klasifikasi yang berbeda, yaitu 2 orang ketua kelompok PKH, 1 orang KPM yang telah mengalami graduasi, dan 4 orang KPM yang belum graduasi. Pemilihan tersebut dilakukan agar penelitian memperoleh gambaran yang lebih beragam mengenai pelaksanaan pendampingan PKH, perubahan kondisi keluarga penerima manfaat, serta hasil peran pendamping dalam mendorong pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi.

a. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap para informan kunci, meliputi pendamping PKH di wilayah Kemantren Kotagede, dan Keluarga Penerima Manfaat KPM. Wawancara ini bersifat semi-terstruktur agar penulis dapat menggali informasi mendalam namun tetap fleksibel sesuai dinamika lapangan. Wawancara semi-terstruktur memungkinkan peneliti memahami lebih

jauh pandangan dan pengalaman informan mengenai fenomena yang diteliti.⁴⁸ Melalui teknik ini, peneliti memperoleh data tentang peran, strategi, serta kendala yang dihadapi pendamping dalam menjalankan tugasnya.

b. Observasi Partisipatif

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengamati aktivitas pendamping PKH dalam proses pendampingan kepada KPM, baik pada kegiatan pertemuan kelompok, monitoring kewajiban pendidikan dan kesehatan, maupun koordinasi antarinstansi. Observasi ini dilakukan secara partisipatif agar peneliti dapat memahami interaksi sosial dan dinamika kerja pendamping secara alami. Observasi partisipatif membantu peneliti memperoleh data kontekstual yang autentik dan menggambarkan realitas sosial secara utuh.⁴⁹

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder seperti laporan pelaksanaan PKH, data capaian SDGs tingkat daerah, pedoman operasional PKH, serta kebijakan pemerintah terkait program perlindungan sosial. Dokumen tersebut digunakan untuk mendukung hasil wawancara dan observasi serta memperkaya analisis data.

Ketiga teknik ini dipilih karena saling melengkapi dalam memperoleh data yang komprehensif. Wawancara memberikan informasi verbal dan perspektif subjektif informan, observasi memperlihatkan realitas empiris, sedangkan dokumentasi memberikan data tertulis yang dapat diverifikasi.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*, Cet. 6 (Bandung: Alfabeta, 2008). hlm 14

⁴⁹ Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014). hlm. 37

4. Teknik Validasi Data

Keabsahan atau validitas data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Validasi data dalam penelitian kualitatif dapat dinilai melalui empat kriteria: kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.⁵⁰

d. Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, seperti pendamping PKH dan Keluarga Penerima Manfaat PKH untuk menilai konsistensi informasi.

e. Triangulasi Metode

Dilakukan dengan memeriksa kesesuaian antara data hasil wawancara, hasil observasi lapangan, dan hasil studi dokumentasi.

Penerapan triangulasi ini bertujuan untuk menjamin kredibilitas dan validitas temuan penelitian, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, peneliti tidak hanya mengandalkan satu sumber informasi, tetapi mengonfirmasi data melalui berbagai sudut pandang dan konteks, sesuai dengan prinsip penelitian kualitatif yang menekankan pemahaman mendalam terhadap realitas sosial yang kompleks.⁵¹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang merujuk pada model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana yang

⁵⁰ Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, *Fourth Generation Evaluation* (SAGE, 1989), hlm. 111-113

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 274-277.

dijelaskan dalam buku *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial secara kontekstual melalui proses analisis yang berlangsung secara terus-menerus sejak tahap pengumpulan hingga penarikan kesimpulan. Model analisis ini melibatkan tiga komponen utama yang selaras, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang keseluruhannya membentuk siklus analisis yang dinamis dan reflektif.⁵²

a. Reduksi data (*Data reduction*)

Proses ini melibatkan seleksi, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk peran, strategi, dan kendala pendamping PKH, diseleksi dan dikategorikan sesuai tema tertentu.

b. Penyajian data (*Data display*)

Setelah data direduksi, hasilnya disajikan dalam bentuk narasi, tabel, atau bagan tematik agar memudahkan peneliti memahami pola hubungan antarvariabel sosial. Penyajian data ini membantu peneliti dalam mengorganisasi temuan dan menarik makna dari hasil penelitian.

c. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion drawing/verification*)

Langkah ini dilakukan dengan menafsirkan makna data yang telah disajikan untuk menemukan pola, hubungan sebab-akibat, serta implikasi sosial dari peran pendamping PKH dalam mendukung pencapaian SDGs. Proses ini berlangsung

⁵² Matthew B. Miles et al., *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (SAGE Publications, 2013), hlm. 12-14

terus menerus hingga diperoleh kesimpulan yang valid dan terverifikasi berdasarkan data lapangan.

Analisis dilakukan secara bersamaan sejak tahap awal pengumpulan data hingga akhir penelitian. Hasil analisis tidak hanya menggambarkan fenomena secara deskriptif, tetapi juga menjelaskan makna yang terkandung di balik tindakan sosial pendamping PKH dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah proses penyusunan penelitian ini, pembahasan disusun secara sistematis ke dalam empat bab utama.

Bab I berisi uraian mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Pada bagian ini juga dipaparkan hasil telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) serta isu-isu terkait SDGs dalam pelaksanaan PKH. Selanjutnya, disajikan kerangka teori yang menjelaskan konsep peran pendamping sosial dalam konteks PKH dan kaitannya dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Bab ini juga menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kemantren Kotagede, Yogyakarta, dengan sumber data utama berupa hasil wawancara mendalam terhadap informan, serta sumber data tambahan berupa dokumentasi.

Pemilihan subjek penelitian dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yang melibatkan pendamping PKH serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Objek penelitian difokuskan pada peran dan strategi pendamping PKH dalam mendukung

pencapaian target-target SDGs, khususnya dalam aspek pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), Observasi Partisipati dan dokumentasi.

Bab II berisi gambaran umum mengenai Program Keluarga Harapan (PKH) secara nasional serta pelaksanaannya di wilayah Kemantren Kotagede, Yogyakarta.

Bab III membahas secara mendalam peran dan strategi pendamping PKH dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses pendampingan.

Bab IV merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi optimalisasi pelaksanaan PKH dalam mendukung tercapainya target SDGs di tingkat lokal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut ini merupakan kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini:

1. Peran pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta menjalankan empat peran yang saling melengkapi berdasarkan kerangka Jim Ife dan Frank Tesoriero. Secara fasilitatif, pendamping membangkitkan motivasi KPM mengakses layanan kesehatan dan pendidikan, memfasilitasi dialog soal biaya sekolah, membantu pengurusan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD), serta menegosiasikan solusi saat dana bantuan disalahgunakan untuk utang konsumtif. Pendamping juga menciptakan ruang diskusi kelompok untuk pengambilan keputusan bersama. Seluruh fungsi ini bermuara pada satu tujuan: kemandirian KPM jangka panjang.

Secara edukatif, pendamping menyelenggarakan P2K2 dengan lima modul literasi keuangan, kesehatan dan gizi, perlindungan lansia dan disabilitas, pengasuhan positif, dan kewirausahaan yang dirancang mengubah perilaku, bukan sekadar menambah pengetahuan. Simulasi menabung menggunakan celengan terbukti lebih efektif daripada ceramah. Meski begitu, perubahan sikap KPM tetap menjadi tantangan tersendiri karena jarak antara pengetahuan dan tindakan nyata tidak bisa diperpendek hanya dengan satu atau dua pertemuan.

Secara representatif, pendamping bertindak sebagai juru bicara kelompok marjinal yang sulit menembus birokrasi menangani aduan mulai dari pengurusan ambulans gratis, lansia terlantar, hingga koordinasi bantuan hukum perceraian melalui Kementerian Hukum dan HAM atau LBH. Peran ini relevan karena sebagian besar KPM tidak memiliki pengetahuan prosedural yang cukup untuk mengakses layanan tersebut secara mandiri.

Secara teknis, pendamping melakukan verifikasi silang data setiap tiga bulan, memonitor kehadiran anak di sekolah dan balita di Posyandu, menangani kartu ATM yang rusak atau terblokir, serta mengidentifikasi KPM yang siap graduasi dengan target 24 KPM per tahun di Kotagede. Pekerjaan ini jarang tampak, tetapi menjadi fondasi akuntabilitas program.

Dalam praktiknya, keempat peran berjalan saling melengkapi. Dalam satu pertemuan, pendamping bisa sekaligus berfungsi edukatif, fasilitatif, lalu berlanjut ke representatif. Kompetensi pendamping PKH dengan demikian bersifat multidimensi: interpersonal, sistemik, dan advokasi sekaligus.

2. Hasil Pendamping PKH dalam Mendorong Pencapaian SDGs di Kemantren Kotagede dapat diamati secara konkret pada empat bidang yang berkorespondensi langsung dengan target SDGs. Bidang pengentasan kemiskinan (SDGs 1) melalui PPSE, KPM berkapasitas wirausaha menerima modal Rp5.000.000 berupa alat produksi bukan uang tunai untuk mencegah penyerapan ke konsumsi jangka pendek. Sejumlah KPM berhasil bertransisi dari buruh harian menjadi wirausahawan kecil dan mencapai graduasi mandiri.

Pilihan bantuan berbasis barang ini lahir dari pengalaman lapangan, bukan sekadar keputusan teknis.

SDGs ke-4 (pendidikan berkualitas). Pendamping menangani kasus anak KPM yang terancam putus sekolah, termasuk anak yang meninggalkan pondok pesantren tanpa melanjutkan ke pendidikan formal. Melalui pendekatan persuasif dan fasilitasi administrasi, anak-anak tersebut kembali bersekolah. Cara pandang orang tua bergeser dari mendorong anak bekerja selepas SMA menjadi mempertimbangkan untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang perkuliahan lewat beasiswa KIP Kuliah atau sekolah kedinasan sebagai jalur yang nyata dan terjangkau.

SDGs ke-3 (Kesehatan sehat dan Sejahtera). Kelurahan Rejowinangun menekan angka stunting hingga nol kasus dan mewakili wilayah dalam lomba kesehatan provinsi. Capaian ini diraih melalui koreksi kebiasaan makan seperti pola nasi lauk mi instan yang lazim di kalangan KPM dan penegakan kehadiran di Posyandu lewat verifikasi bantuan, dan sinergi data dengan BKKBN.

SDGs ke-10 (pengurangan kesenjangan) pendamping mendorong tertib administrasi kependudukan: penulisan nama akta kelahiran sesuai ketentuan dan kepemilikan jaminan kesehatan bagi seluruh anggota keluarga. Kesalahan dokumen yang tampak kecil ini sering menjadi hambatan struktural akses layanan publik. Dengan membenahi hal ini sejak awal, pendamping membangun inklusivitas sosial dari level paling dasar.

Hambatan utamanya dalam pendampingan bukan birokrasi, melainkan psikologis mentalitas ketergantungan yang sudah mengakar. Mengubah pola

pikir ini butuh waktu, konsistensi, dan kedekatan relasi yang tidak bisa digantikan oleh prosedur administratif apapun. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PKH bukan sekadar mekanisme transfer bantuan. Dalam praktik di Kemantren Kotagede, program ini menjalankan fungsi pembangunan manusia yang bertahap dan multidimensi. Pencapaian SDGs tidak terjadi otomatis dari bantuan finansial, melainkan dari perubahan perilaku, peningkatan kapasitas, dan perluasan akses yang difasilitasi pendamping secara langsung. Keberhasilan PKH tidak cukup diukur dari besaran dana yang disalurkan, tetapi dari kualitas relasi dan komitmen pendamping dalam mendorong perubahan yang bertahan setelah program berakhir.

Pendamping PKH di Kemantren Kotagede Yogyakarta menjalankan fungsi yang melampaui tugas penyaluran bantuan. Nol kasus stunting di Rejowinangun, pergeseran orientasi pendidikan keluarga menuju perguruan tinggi, transisi KPM dari buruh menjadi wirausahawan, dan tertibnya dokumen kependudukan ratusan keluarga miskin dan rentan semuanya adalah hasil pendampingan yang terstruktur dan konsisten. Dampaknya memang tidak selalu terlihat dalam satu siklus program, tetapi jejaknya nyata dalam kehidupan keluarga yang didampingi. Dalam pembangunan sosial yang berkelanjutan, pendamping PKH bukan pelengkap program mereka adalah penggerak utamanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai peran pendamping PKH dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) di Kemantren Kotagede Yogyakarta, berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk keberlanjutan dan pengembangan inisiatif serupa:

1. Pendamping PKH perlu memperkuat strategi pendampingan dengan mengambil inisiatif dalam merancang program kewirausahaan yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan nyata KPM di wilayahnya. Materi kewirausahaan dalam modul P2K2 yang bersifat umum belum cukup untuk membekali KPM dengan keterampilan praktis yang siap diterapkan. Pendamping dapat menyusun program kewirausahaan berbasis potensi lokal, misalnya pelatihan pengolahan produk rumahan, pengelolaan keuangan usaha kecil, atau pemanfaatan platform digital untuk pemasaran sebagai pelengkap materi yang telah ada. Dengan merancang program secara mandiri dan kontekstual, pendamping tidak hanya memperluas wawasan KPM, tetapi juga mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi yang lebih konkret sebagai bekal menuju graduasi dari program PKH.
2. Pemerintah Kota Yogyakarta dan Kemensos perlu memberikan perhatian lebih pada beban kerja pendamping PKH. Tugas yang diemban tidak hanya terbatas pada program PKH, tetapi meluas menjadi *focal point* berbagai layanan sosial di wilayah mulai dari mengurus data non aktif BPJS dengan jumlah pendataan yang banyak ini berpotensi mengurangi efektivitas pendampingan jika tidak

diimbangi dengan penambahan kapasitas, baik dari sisi jumlah tenaga maupun dukungan operasional.

3. KPM perlu mengambil peran yang lebih aktif dalam proses pendampingan, bukan sekadar hadir sebagai peserta pasif dalam pertemuan P2K2. Materi yang telah diterima baik tentang literasi keuangan, gizi, maupun pengasuhan anak semestinya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk tanggung jawab terhadap bantuan yang diterima. KPM yang telah memiliki kapasitas ekonomi yang membaik juga didorong untuk mempersiapkan diri menuju graduasi dari program PKH, sehingga alokasi bantuan dapat dialihkan kepada keluarga lain yang lebih membutuhkan.
4. Penelitian ini terbatas pada satu wilayah Kemantren dengan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi secara luas. Peneliti selanjutnya dapat memperluas cakupan wilayah atau menggunakan pendekatan komparatif antara beberapa kemantren dengan karakteristik yang berbeda. Perlu dikaji lebih dalam mengenai efektivitas jangka panjang perubahan perilaku KPM pascapendampingan Graduasi sebuah dimensi yang belum terjawab dalam penelitian ini. Penelitian dengan metode campuran (*mixed methods*) yang mengintegrasikan data kuantitatif terkait indikator SDGs juga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kontribusi nyata program PKH terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rochmah Deiffy Amalia, A. Subowo, and R. S. Santoso,. “PERAN PENDAMPING SOSIAL DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KEMANTREN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG.” *Journal of Public Policy and Management Review* 13, no. 3 (2024): 16. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i3.45301>.
- Abbas, Risma, Mohamad Tahir Haning, Hasniati Hasniati, Muhammad Rusdi, and Muh Akmal Ibrahim. “Evaluation of PKH and BPNT Social Assistance Programs Using William Dunn’s Five Dimensions: A Case Study in West Sulawesi, Indonesia.” In *Proceedings of the 2nd International Conference on Administrative Science (ICAS 2024)*, vol. 941, edited by Ahmad Yani Andi and Ismail Nuralamsyah. Advances in Economics, Business and Management Research. Atlantis Press International BV, 2025. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-791-5_41.
- Anggrasari, Felicia Putri, and Muhammad Hanri. “Breaking the Poverty Cycle: Impact of Social Assistance on Intergenerational Poverty.” *The Journal of Indonesia Sustainable Development Planning* 6, no. 2 (2025): 225–38. <https://doi.org/10.46456/jisdep.v6i2.733>.
- Anzarkusuma, Indah Suci, Sandra Fikawati, and Ariani Tri Rahmi. “DETERMINAN STUNTING PADA ANAK USIA 24-59 BULAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: ANALISIS DATA SURVEI STATUS GIZI INDONESIA (SSGI) TAHUN 2022.” *GIZI INDONESIA* 48, no. 1 (2025): 55–68. <https://doi.org/10.36457/gizindo.v48i1.1094>.
- Bahari AdiJaya, Riski. “PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUMENEP.” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2, no. 1 (2025): 193–214. <https://doi.org/10.24929/semnasfisip.v2i1.4071>.
- Creswell, John W., and J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, 2017.
- Damayanti, Dede, Titi Stiawati, and Arenawati Arenawati. “Program Keluarga Harapan Dalam Kerangka Sustainable Development Goals (SDGs): Kajian Literatur Terhadap Kontribusinya Terhadap Tujuan Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 4, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.37676/mude.v4i3.8698>.
- dkk, Helin Garlinia Yudawisastra. *BUKU PENGEMBANGAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)*. Penerbit Widina Media Utama, 2025.
- Dzaky Satria, Ihsan Hutama Kusasih, and Gusmaneli Gusmaneli. “Analisis

Rendahnya Kualitas Pendidikan Di Indonesia Saat Ini: Suatu Kajian Literatur.” *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 3, no. 2 (2025): 292–309. <https://doi.org/10.55606/jubpi.v3i2.3838>.

Guba, Egon G., and Yvonna S. Lincoln. *Fourth Generation Evaluation*. SAGE, 1989.

Harmonis, Ika Rini, and Abdul Malik. “Peran Pendamping PKH Dalam Upaya Mencapai SDG’s Di Kemantren Kaliwungu Selatan.” *Future Academia : The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced* 2, no. 3 (2024): 107–24. <https://doi.org/10.61579/future.v2i3.101>.

<https://kemensos.go.id>. “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021.” Kementerian Sosial Republik Indonesia. Accessed October 17, 2025. <http://kemensos.go.id/unduh/buku/pedoman-pelaksanaan-program-keluarga-harapan-tahun-2021>.

Ife, Jim, Frank Tesoriero, Saifuddin Zuhri Qudsy, Sastrawan Manulang, Nurul Yakin, and M. Nursyahid. *Community development: alternatif pengembangan masyarakat di era globalisasi*. 3rd ed. Pustaka Pelajar, 2016.

Jusrianto, Jusrianto. “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FAKTOR PENDUKUNG SEKRETARIS DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN DI BIDANG ADMINISTRASI.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 3, no. 2 (2020): 184–88. <https://doi.org/10.47647/jsh.v3i2.285>.

“Kemantren Kotagede.” Accessed February 9, 2026. <https://kotagedekek.jogjakota.go.id/page/index/letak-geografis>.

Komalasari, Dewi, and Fentiny Nugroho. “Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Mencapai Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi Pada Pendamping Sosial Dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial Dan Nonkesejahteraan Sosial).” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, no. 5 (2023): 3182. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2632>.

Maani, Karjuni Dt. “Teori ACTORS dalam Pemberdayaan Masyarakat.” *Demokrasi* 10, no. 1 (2011): 242140.

Maharani, Angelia, Yosy Arisandy, and Miko Polindi. “PENGARUH SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN DI PROVINSI BENGKULU DENGAN PKH SEBAGAI MODERATING.” *Jurnal Manajemen & Bisnis Jayakarta* 7, no. 01 (2025): 83–94. <https://doi.org/10.53825/jmbjayakarta.v7i01.395>.

Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2014.

- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications, 2013.
- Mujalli, and Moh Syarif. "MODEL PENGELOLAAN DANA DESA BERBASIS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG's) Desa." *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam* 7, no. 01 (2024): 1–12. <https://doi.org/10.56998/jr.v7i01.72>.
- Murdiyatmoko, Janu. *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*. PT Grafindo Media Pratama, n.d.
- Najla Hikmalia Dhiyaa Ulhaq, Nisa Kusumawati, and Agus Salim. "Pemberdayaan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Pada Balita Stunting Di Umbulharjo, Yogyakarta." *JISHUM : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 4 (2024): 517–26. <https://doi.org/10.57248/jishum.v2i4.406>.
- Nandini, Riska, Bimby Gita Rama Putri, Syeikha Nabilla Setiawan, Fitriya Anggraeni, and Muhammad Fedryansyah. "PERAN PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM UPAYA RESOLUSI KONFLIK SOSIAL DI DESA GENTENG KEMANTREN SUKASARI, KABUPATEN SUMEDANG." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v4i1.38294>.
- Patilaiya, Hairudin La, James Sinurat, Budi Sarasati, et al. *PEMBERDAYAAN MASYARAKAT*. 2022.
- Phina Karina and Amin Yusuf. "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Mengatasi Kemiskinan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kemantren Taman Kabupaten Pematang." *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara* 5, no. 1 (2025): 64–81. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i1.5729>.
- Pradika, Nurul Aini, and Calvin Edo Wahyudi. "PERAN KADER RW 08 KELURAHAN KEPUTIH KEMANTREN SUKOLILO KOTA SURABAYA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)." *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik* 6, no. 4 (2023): 193–200. <https://doi.org/10.24198/responsive.v6i4.52290>.
- Putri Nur Azizah and Ananta Prathama. "PERAN DINAS SOSIAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI DESA SUMBERKEPUH KEMANTREN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK." *Journal Publicuho* 7, no. 2 (2024): 695–704. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i2.410>.

Raintung, Anggreyni, Sarah Sambiran, and Ismail Sumampow. "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Mobuya Kemantren Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow." *GOVERNANCE* 1, no. 2 (2021).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35369>.

Ramadhani, Putri Erika, and Nandang Mulyana. "PERAN PENDAMPING DALAM PENGEMBANGAN USAHA KELOMPOK BINAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) (Di Desa Lebakagung Kemantren Karangpawitan Kabupaten Garut)." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 2, no. 1 (2020): 64. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i1.27049>.

"RECALIBRATING SOCIAL PROTECTION: INSIGHTS FROM IMPLEMENTATION OF INDONESIA'S FAMILY HOPE PROGRAM (PKH) - ProQuest." Accessed May 24, 2026.
<https://www.proquest.com/openview/b6bccab61b5ca18e7cc37af8166489c7/1?pq-origsite=gscholar&cbl=55210>.

Sabon, Agnes Nadia Prasetyana Siba, and I. Nyoman Mahaendra Yasa. "DETERMINAN TINGKAT KEMISKINAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR." *NETIZEN: JOURNAL OF SOCIETY AND BUSSINESS* 1, no. 8 (2025): 17–40.

Salim, Agus. *Perubahan sosial: sketsa teori dan refleksi metodologi kasus Indonesia*. Cet. 1. Tiara Wacana Yogya, 2002.

Simonis, Udo E. "The Age of Sustainable Development." *International Journal of Social Economics* 44, no. 12 (2017): 2500–2502.
<https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2016-0224>.

Sompie, Maulida Eka Putri. "Analisis Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kemantren Sungai Serut." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 1, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.37676/mude.v1i3.2210>.

Sri Ratna Ningrum, Babang Robandi, Uyu Wahyudin, Mustofa Kamil, and Enkeu Agiati. "Refleksi Kinerja Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Garut untuk Mendukung Program Pengentasan Kemiskinan." *Sosio Konsepsia* 14, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.33007/ska.v14i2.3567>.

Sugiyono. *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. Cet. 6. Alfabeta, 2008.

Suhardono, Edy. *TEORI PERAN (Konsep, Derivasi dan Implikasi di Era Transformasi Sosio- Digital"*. Zifatama Jawara, 2025.

Suharto, Edi. *Membangun masyarakat, memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*. Refika Aditama, 2005.

- Sulianti, Ani, Didit Yulian Kasdriyanto, and Febriyanto. "Peran Guru Dalam Menanamkan Sikap Toleransi Siswa Melalui Pembelajaran PPKn Kelas VII Di MTS Raudhlatul Hasaniyah Kabupaten Probolinggo." *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Konseling* 1, no. 2 (2023): 129–31. <https://doi.org/10.47233/jpdsk.v1i2.67>.
- Sumbawati, Novi Kadewi, A. Asmini, Heni Juliawati, and Binar Dwiyanto Pamungkas. "EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA ROPANG." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 8, no. 3 (2020): 194–203. <https://doi.org/10.58406/jeb.v8i3.570>.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Sixth edition. SAGE, 2018.
- Yudawisastra, Helin G., Mokhamad Anwar, Sulaeman R. Nidar, and Yudi Azis. "The Role of Green Entrepreneurship and Green Variables in Sustainable Development in the Culinary Sector in Indonesia: Early Days of the COVID-19 Pandemic." *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management* 6, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.28992/ijssam.v6i2.689>.
- Zen, Najmatul Haya, Lince Mageiasti, and Yulhendri. "Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2025): 775–85. <https://doi.org/10.59435/gjmi.v3i1.1316>.